

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PELAPORAN DATA DALAM MENCEGAH PENGGELAPAN PAJAK DANA DESA PADA KANTOR WALI NAGARI BUO KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR

OLEH

SHERLY QHURATTA AYUNI
NIM. 01870624289



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : SHERLY QHURATTA AYUNI
 NIM : 01870624289
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : EFEKTIVITAS PELAPORAN DATA DALAM MENCEGAH
 PENGHELAPAN PAJAK DANA DESA PADA KANTOR WALI
 NAGARI BUO KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN
 TANAH DATAR

Disetujui oleh:

PEMBIMBING

Sawitri Triandani, SE. M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

Mengetahui:

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
D3 Administrasi Perpajakan

Sawitri Triandani, SE. M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : SHERLY QHURATTA AYUNI
 NIM : 01870624289
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : EFEKTIVITAS PELAPORAN DATA DALAM
 MENCEGAH PENGELAPAN PAJAK DANA DESA
 PADA KANTOR WALI NAGARI BUO KECAMATAN
 LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR
 TANGGAL UJIAN : 13 JULI 2021

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

Dr. Kamaruddin, S. Sos. M. Si
 NIP. 19790101 2007 101003

ANGGOTA

PENGUJI I

Dr. Khairil Henry, SE. M. Si. Ak
 NIP. 197511292008011009

PENGUJI II

Afrizal, S. Sos. M. Si
 NIP. 19690419 2007 011025



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

EFEKTIFITAS PELAPORAN DATA DALAM MENCEGAH PENGGELOPAN PAJAK DANA DESA PADA KANTOR WALI NAGARI BUO KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR

SHERLY QHURATTA AYUNI

01870624289

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaporan Data Dalam Mencegah Penggelapan Pajak Dana Desa Pada Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan perdesaan di Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh dari pihak Kantor Wali Nagari Buo. Manfaat penelitian ini ialah sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan Kantor Wali Nagari Buo serta sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, dan bagi Kantor Wali Nagari Buo penelitian ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bendahara Desa dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelaporan, Dana Desa, Penggelapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF DATA REPORTING IN PREVENTING VILLAGE FUND TAX EMBEDIATION AT THE OFFICE OF WALI NAGARI BUO, LINTAU BUO DISTRICT, TANAH DATAR REGENCY

SHERLY OHURATTA AYUNI
01870624289

This research is entitled "Effectiveness of Data Reporting in Preventing Village Fund Tax Embezzlement at the Office of Wali Nagari Buo, Lintau Buo District, Tanah Datar Regency". The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of village funds in supporting rural development in Nagari Buo, Lintau Buo District, Tanah Datar Regency. The results of this study were based on interviews and data obtained from the Office of the Mayor of Nagari Buo. The benefits of this research are as material for the community and the Office of the Wali Nagari Buo as well as a reference for further research, and for the Office of the Wali Nagari Buo this research aims to find the problems faced by the Village Treasurer in fulfilling his tax obligations.

Keywords: *Effectiveness, Reporting, Village Funds, Embezzlement*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Efektivitas Pelaporan Data Dalam Mencegah Penggelapan Pajak Dana Desa Pada Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar”.

Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kesehatan, Kemudahan pemahaman, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat Menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk yang teristimewa, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orangtua yaitu Apa dan Ama saya yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan Dukungan dan do'a hingga Tugas Akhir ini dapat di selesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial atas segala bantuannya yang telah memudahkan proses administrasi dalam Mengurus surat izin rizet dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Ibu Dr. Hj Leny Nofianti MS, SE, M.Si,Ak.CA Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial atas bantuannya yang telah memudahkan proses administrasi dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir.
6. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial atas bantuannya yang telah memudahkan proses administrasi dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir.
7. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, MA Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial atas bantuannya yang telah memudahkan proses administrasi dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir.
8. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan Masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.
10. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak. Selaku Penasehat Akademik.
11. Para Dosen Jurusan Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan Bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) Tahun perkuliahan
12. Seluruh Staf Jurusan D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali, terimakasih atas bantuan yang Tiada hentinya bagi penulis selama ini.
13. Seluruh Pegawai di Kantor Wali Nagari Buo yang telah banyak membantu Memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.
14. Kepada Keluarga Besar, Kakek, Abang, Adek, Om, Tante, Sepupu, kerabat Serta sahabat dekat penulis lainnya. Terimakasih banyak selalu memotivasi Penulis agar segera menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan cepat.
15. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
16. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang Tidak bisa di sebutkan satu per satu.

Sebagaimana manusia biasa tentunya penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya kekurangan dalam penulisan laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama menyusun Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana untuk memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Juli 2021
Penulis,

SHERLY QHURATTA AYUNI
NIM: 01870624289

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir	10
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR WALI NAGARI BUO KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR	
2.1 Sejarah Nagari Buo Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar	12
2.2 Visi dan Misi Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar	14
2.3 Struktur Organisasi Instansi	14
2.4 Srtuktur Organisasi Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.	15
2.5 Gambaran Pegawai Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo	15
2.6 Uraian Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Buo	17
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori.....	19
3.1.1 Pengertian Pajak	19
3.1.2 Fungsi Pajak	22
3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	22
3.1.4 Pajak Menurut Syar'iah	24
3.1.5 Pajak Menurut Pandangan Islam	26
3.1.6 Hubungan Pajak Dengan Dana Desa.....	28
3.1.7 Pengertian Dana Desa.....	30
3.1.8 Sejarah Desa	31
3.1.9 Pengertian Desa	33

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.10 Karakteristik Desa	35
3.1.11 Dasar Hukum Dana Desa.....	36
3.1.12 Tujuan Dana Desa.....	37
3.1.13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	37
3.1.14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	39
3.1.15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	40
3.1.16 Pos Belanja Desa Secara Umum Terdiri Atas:	43
3.1.17 Pengalokasian Dana Desa.....	45
3.1.18 Pengawasan Dana Desa	46
3.1.19 Tujuh Sumber Pendapatan Menurut Undang-Undang .	46
3.1.20 Pemerintah Desa	47
3.1.21 Upaya Yang Di Lakukan Pemerintah Untuk Mencegah Penggelapan Pajak Dana Desa	49
3.1.22 Pelaksanaan Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Desa.....	50
3.1.23 Azas Pengelolaan Keuangan Desa.....	51
3.1.24 Efektivitas	52
3.1.25 Pelaporan	52
3.2 Tinjauan Praktek	53
3.2.1 Efektivitas Pelaporan Pajak Dana Desa di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar	53
3.2.2 Cara Untuk Mengantisipasi Adanya Penggelapan Pajak Dana Desa di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.....	57
3.2.3 Untuk Apa Saja Pemanfaatan Dana Desa di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar	65
3.2.4 Perbandingan Teori dan Praktek.....	69

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Bidang Kegiatan Penyelenggaraan Nagari.	4
Tabel I.II	Realisasi PPh pajak dan Retribusi Tahun 2020 di Nagari Buo	6
Tabel II.I	Daftar Nama-Nama Wali Nagari Yang Pernah Menjabat Di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar	13
Tabel II.II	Sebaran Jumlah Pegawai Kantor Wali Nagari Buo	16
Tabel III.I	Realisasi Program Berdasarkan Tujuan Dana Desa	55
Tabel III.II	Setoran Pajak Dana Desa Kantor Wali Nagari Buo	63
Tabel III.III	Data Realisasi Dana Desa Dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020 di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar	67
Tabel III.IV	Data Dana Desa Dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kantor Wali Nagari Buon Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.....	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I	Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.....	15
-------------	--	----





DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian

Surat Bimbingan Laporan Penelitian

Surat Balasan Dari Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten

Tanah Datar

Daftar Pertanyaan Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia terus berkembang. Persaingan semakin ketat dan masyarakat dituntut untuk dapat bersaing dalam menghadapi tantangan di era globalisasi dunia internasional akan mengakui kemajuan bangsa apabila sebagian besar masyarakat mampu menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia dengan tingkat presentase besar, yaitu kurang lebih sebesar 84,3%. Dengan penerimaan yang bersumber dari pajak, pemerintah bisa mengadakan pemenuhan kebutuhan seperti belanja pegawai maupun untuk pembiayaan pengadaan fasilitas publik, diantaranya untuk pembangunan jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte, telepon umum dan fasilitas lain. Negara juga menggunakan hasil penerimaan pajak untuk memberikan fasilitas dalam rangka penjaminan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Disadari maupun tidak, setiap warga Negara menikmati fasilitas atau pelayanan publik yang pengadaannya dibiayai dengan uang yang berasal dari penerimaan pajak.

Pajak adalah suatu kewajiban ke negara dalam hal pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesengajaan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dana desa, laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan dana desa sebagai sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari APBN. Dana desa merupakan bentuk konkrit pengakuan negara terhadap hak asal usul desa dan kewenangan local berskala desa. Dana desa diharapkan menjadi tambahan energy bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri.

Dana Desa itu sendiri dialirkan untuk pembangunan dan pemeliharaan desa diantaranya seperti; pembuatan jalan, prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana prasarana usaha ekonomi produktif. Di Kantor Wali Nagari Buo sendiri Dana Desa tersebut dialirkan untuk pembangunan desa, Namun dikhawatirkan akan menjadi lahan aparaturnya melakukan tindak pidana korupsi. Sekretaris desa Kantor Wali Buo melakukan perincian setiap dana desa yang masuk dan membuat laporan pertanggungjawaban untuk bukti bahwa dana desa yang dialirkan ke Nagari Buo tepat sasaran. Kantor Wali Nagari Buo dipimpin oleh seorang Wali Nagari, di desa Buo seorang pemimpinnya disebut sebagai wali nagari berbeda dengan di Kota yang biasanya disebut lurah. Wali nagari mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab terhadap kelancaran dan kesuksesan di sebuah nagari.

Berikut penulis akan menyajikan data dana desa yang di keluarkan pada tahun 2020 oleh pemerintahan nagari Buo:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.I
Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Bidang Kegiatan Penyelenggaraan Nagari.

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	429.750.000	427.590.000	2.160.000
2	Pnyediaan jaminan sosial bagi Wali Nagari dan perangkat nigari	2.279.472	1.809.000	470.472
3	Penyediaan operasional pemerintahan nagari (ATK, Honor PPKN, pemeliharaan kendaraan Bermotor, dll)	150.605.528	150.406.960	198.568
4	Penyediaan Tunjangan BPRN	41.160.00	41.160.00	-
5	Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN)	21.800.000	21.524.000	276.000
6	Penyediaan sarana perkantoran atau pemerintahan modal	23.400.000	8.232.700	15.167.300
7	Pengelolaan administrasi kependudukan	3.292.880	3.292.800	80.000
8	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan perencanaan nigari	20.000.000	19.589.100	410.900
9	Penyelenggaraan musyawarah jorong	3.869.279	3.864.000	5.279
10	Penyusunan dokumen perencanaan nagari (RPJM/RKP)	9.000.000	8.996.500	3.500
11	Penyusunan dokumen			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
	keuangan nagari (APBNagari/APB perubahan/LPJ)	17.496.000	17.441.900	54.100
12	Penyusunan laporan wali nigari	3.000.000	2.999.600	54.100
13	Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilwana	38.000.000	10.304.400	27.695.600
14	Administrasi Pajak Bumi Bangunan (PBB)	31.992.450	20.130.650	11.861.800
	Jumlah	792.645.609	737.341.610	58.303.999

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Kantor Wali Nagari Buo. April 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa jumlah anggaran dana desa yang diberikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada desa Buo pada tahun 2020 sangat besar, hal ini sebagai bentuk komitmen dan perhatian pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemandirian desa.

Besarnya anggaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar kepada Nagari Buo, maka pemerintahan di Nagari Buo berkewajiban untuk mengelola serta mempertanggungjawabkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, maka pemerintahan Nagari Buo harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa.

Berikut penulis akan menyajikan data dana desa laporan pertanggungjawaban dalam Realisasi PPh dan Retribusi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.II
Realisasi Pajak anggaran dana desa Tahun 2020 di Nagari Buo

No	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten	41.892.450	20.167.161	21.725.289
2	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	20.900.000	5.747.700	15.152.300
3	Administrasi pajak bumi bangunan (PBB)	31.992.450	20.130.650	11.861.800
Jumlah		52.892.450	25.878.350	27..014.100

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Kantor Wali Nagari Buo. April 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas bisa dilihat bahwa 1. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten mendapatkan anggaran 41.892.450 dan yang terealisasi 20.167.161 dengan sisa 21.725.289, 2. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dengan anggaran 20.900.000 yang terealisasi 5.747.700 dengan sisa 15.152.300. dimana sisa anggaran yang tidak terpakai tersebut akan di catat di buku pedoman Wali Nagari Buo dan dilaporkan ke pemerintah pusat yang bisa di lihat di website Peraturan Daerah Bupati Tanah Datar Nomor 7, di samping itu pemerintahan nagari buo juga dikasih surat pertanggungjawaban dari pemerintah pusat yang setiap anggaran yang tersisa harus di sertakan untuk tahap pencairan dana desa selanjutnya. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintahan Nagari Buo dalam setiap kegiatan atau perencanaan kegiatan yang akan dilakukan didalam nagari tersebut maka tindak penggelapan pajak dana desa yang diberikan pemerintahan pusat kepada Kantor Wali Nagari Buo di setiap kegiatan dapat diketahui.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“EFEKTIVITAS PELAPORAN DATA DALAM**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MENCEGAH PENGGELAPAN PAJAK DANA DESA PADA KANTOR WALI NAGARI BUO KECAMATAN LINTAU BUO”

1.2.Rumusan Masalah

1. Apakah pelaporan data di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar sudah efektif?
2. Bagaimana cara untuk mengantisipasi adanya penggelapan pajak dana desa di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar?
3. Untuk apa saja pemanfaatan dana desa di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa efektif pelaporan data di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui cara mengantisipasi adanya Penggelapan Pajak dana desa pada Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui apa saja pemanfaatan dana desa yang ada pada Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program D3 Administrasi Perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai media untuk menambah wawasan.
 - c. Sebagai sarana untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah pajak.
 - d. Untuk menambah pemahaman yang berguna untuk dibidang pekerjaan Nantinya.
2. Bagi Kantor Wali Nagari Buo
 - a. Sebagai tambahan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk menambah pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan Dana Desa khususnya pemerintahan Nagari Buo.
 3. Bagi pihak lain.
 - a. Sebagai tambahan informasi dalam meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dan Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari 2021

1.5.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menurut (Sugiyono 2012:139) menjelaskan Data primer adalah data yang didapatkan langsung dilapangan oleh penulis. Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada pegawai Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau BUo Kabupaten Tanah Datar.

- b) Menurut Sekaran, (2011:176) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti, melainkan diperoleh melalui beberapa dokumen yang sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a) Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Wali Buo khususnya kepada bagian bendahara keuangan yang mampu Memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan peneliti Ini. (Joko Subago 2011:39)
- b) Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini.
- c) Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015:329) yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir ini.

1.5.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada sedemikian rupa kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang sudah diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk keperluan penyusunan ini nantinya, maka secara umum penulis menguraikan kedalam empat Bab yang masing-masing Bab menjadi sub Bab sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR WALI NAGARI BUO

Bab ini menjelaskan gambaran Kantor Wali Buo struktur Organisasi dan uraian tugas Kantor Wali Buo.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini berisikan uraian tentang definisi pajak, fungsi Pajak hak dan kewajiban wajib pajak menurut syariah,

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Pengertian, fungsi, dasar hukum perpajakan, manfaat dan
Pengertian apa itu dana desa.

PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian serta membuat
Kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR WALI NAGARI BUO KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR

2.1 Sejarah Nagari Buo Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

Nagari Buo adalah Nagari Rajo Minangkabau yang pertama dan di tata secara islam setelah Sumpah Satie Bukit Marapalam. Nagari Buo salah satu Raja Minangkabau ada di Buo yaitu Rajo Adat dan disinilah tempat bersemayam Rajo Adat Minangkabau.

Adapun suku-suku yang ada di Nagari Buo adalah sebagai berikut:

1. Caniago
2. Melayu
3. Mandahiling
4. Pangian Kecil
5. Kampung Gadang

Sejak zaman Belanda dan Jepang sampai sekarang berikut di tampilkan nama-nama Wali nagari yang pernah menjabat di Nagari Buo:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.I

Daftar Nama-Nama Wali Nagari Yang Pernah Menjabat Di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

NO	NAMA	SUKU	PERIODE JABATAN
1	YUSUF ENGKU PETOKARI	MELAYU	ZAMAN BELANDA
2	DATUAK PALO JUNIK	PANGIAN KECIL	ZAMAN BELANDA
3	N.DT. PARPATIAH	CANIAGO	ZAMAN JEPANG
4	NUMIN SUTAN KHATIB	KP. GADANG	ZAMAN JEPANG
5	ZAINUDIN S. DUBALANG	PANGIAN KECIL	
6	NURIN	MELAYU	
7	DOHAM PANGULU MUDO	CANIAGO	
8	SUBLI MOJO PAKIAH	PANGIAN KECIL	
9	DOHAM P. MUDO	CANIAGO	
10	SYAIFUL ANWAR	KP. GADANG	1975-1980
11	DARWIN S. DUBALANG	PANGIAN KECIL	1980-1998
12	DJASMAN DEWAN	PANGIAN KECIL	1998-2001
13	VENTJE.SY	MELAYU	2001-2005
14	ERianto	KP. GADANG	2005-2006
15	DJASMAN DEWAN	PANGIAN KECIL	2006-2012
16	YOFI ARDI	KP. GADANG	2012- 2018

Sumber: Kantor Wali Nagari Buo. April 2021

2.2 Visi dan Misi Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

1. Visi

- a. Terciptanya pelayanan yang baik untuk masyarakat nagari Buo secara Professional, cepat, maksimal dan dapat di pertanggungjawabkan.

2. Misi

- a. Memberikan cakupan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan prima Disegala urusan secara berkesinambungan, tepat sasaran untuk pencapaian Kepentingan public secara merata.

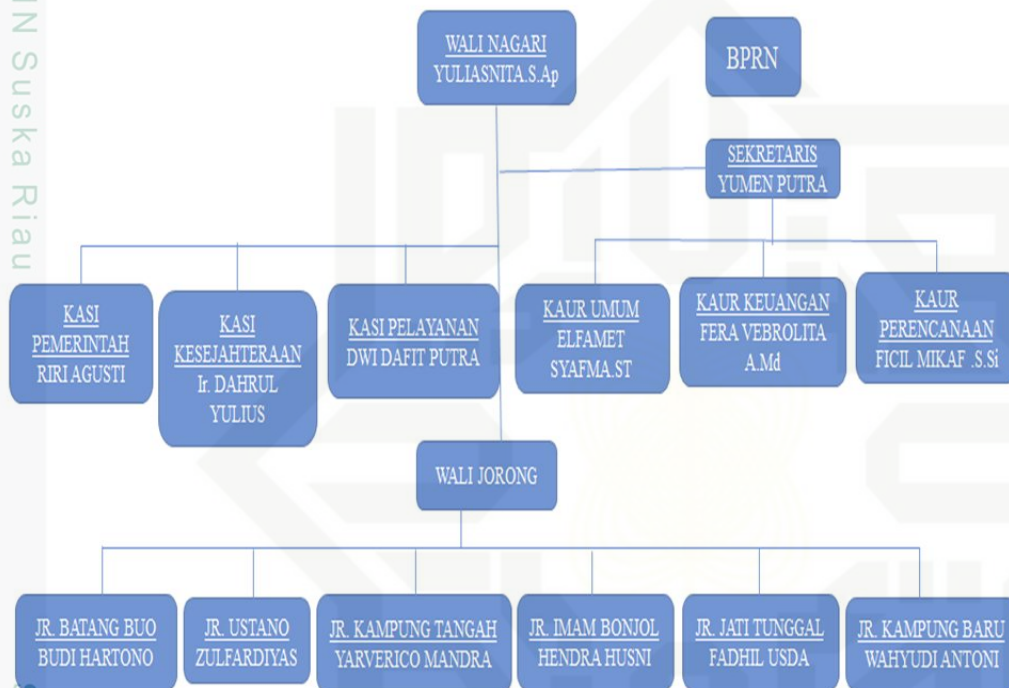
2.3 Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi disusun sebagai syarat mutlak atau yang harus ada dalam setiap kantor, perusahaan atau lembaga, karena struktur organisasi membagi peranan serta tanggung jawab wewenang tiap-tiap seksi yang ada dalam kantor, perusahaan atau lembaga. Struktur organisasi ini dibuat atau disusun agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian atau staf. Dengan demikian, sangat jelas tampak adanya pemisah fungsi sehingga tidak terjadinya saling menyalahkan dan saling menghambat yang dapat timbul karena pengorganisasian yang kurang baik.

Secara ringkas, struktur organisasi Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh Ibuk Yuliasnita yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa seksi yang terdiri dari;

Gambar II.I

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WALI NAGARI BUO KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR



Sumber: Kantor Wali Nagari Buo. April 2021

2.4 Srtuktur Organisasi Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

Kantor Wali Buo dipimpin oleh seorang kepala kantor yang secara operasional bertanggung jawab kepada kepemimpinan kantor Wali Nagari Buo dan adanya kelancaran sebuah organisasi di bantu oleh kasi . Adapun struktur atau kasi yang ada di Kantor Wali Nagari Buo Yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. KASI PEMERINTAH
2. KASI KESEJAHTERAAN
3. KASI PELAYANAN
4. KAUR KEUANGAN
5. KAUR PERENCANAAN
6. WALI JORONG JATI TUNGGAL
7. WALI JORONG IMAM BONJOL
8. WALI JORONG KAMPUNG TANGAH
9. WALI JORONG USTANO
10. WALI JORONG KAMPUNG BARU
11. WALI JORONG BATANG BUO

2.5 Gambaran Pegawai Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo

Kantor Wali Nagari Buo di kepalai seorang kepala kantor yang membawahi 11 kasi.

Tabel II.II
Sebaran Jumlah Pegawai Kantor Wali Nagari Buo

Nama unit/Kasi tugas Masing-masing Kepala Kantor Wali Buo	Jumlah Pegawai
	1
Sekretaris	1
Kasi Pemerintah	1
Kasi Kesejahteraan	1
Kasi Pelayanan	1
Kaur Keuangan	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama unit/Kasi tugas Masing-masing	Jumlah Pegawai
Kaur Perencanaan	1
Kepala jorong Km. tengah	1
Kepala Jorong Imam Bonjol	1
Kepala Jorong Batang Buo	1
Kepala Jorong Kampung Baru	1
Kepala Jorong Jati Tunggal	1

Sumber: Kantor Wali Nagari Buo. April 2021

2.6 Uraian Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Buo

2.6.1 Tugas pegawai di Kantor Wali Nagari Buo

a. Wali Nagari Buo

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan memimpin menyelenggarakan kegiatan nagari.

b. Sekretaris

Mencatat semua kegiatan atau keperluan yang dibutuhkan oleh wali nagari

c. Kasi Pemerintah

Untuk kelancaran dibidang pemerintahan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

d. Kasi Kesejahteraan

Untuk mengendalikan segala urusan yang dilakukan dan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

e. Kasi Pelayanan

Untuk melayani masyarakat dalam urusan surat menyurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kaur Keuangan.

Mengurus segala hal yang berhubungan dengan keuangan, mengelola sistem keuangan pemerintahan.

g. kaur Perencanaan

Untuk mengatur semua perencanaan yang akan diadakan nagari.

2.6.2 Fungsi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Buo

- a. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan nagari sesuai dengan hak asal usul Nagari berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama BPRN.
- b. Mengajukan rancangan peraturan nagari
 - c. Menetapkan peraturan nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPRN
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan nagari tentang APB nagari, Termasuk APB nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPRN
 - e. Membina dan mengembangkan kehidupan sosial masyarakat nagari.
 - f. Membina, menegakkan dan mengamalkan kehidupan adat dan syarak.
 - g. Membina dan meningkatkan perekonomian nagari
 - h. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif
 - i. membuat penegasan hak atau pengalihan atas tanah yang belum disertifikatkan Sesuai rekomendasi dari KAN
 - j. Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum Untuk mewakailinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi belanja desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bendahara desa mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas belanja desa sesuai dengan ketentuan dan data yang berlaku. Hasil pemungutan dan pemotongan wajib disetor ke pemerintah sesuai dengan jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahra desa. Selain itu bendahra desa pada dasarnya adalah bendahara pemerintah sehingga secara umum bendahara desa harus mengikuti ketentuan tentang bendahara pemerintahan dan mereka wajib melaporkan segala pajak yang telah dipotong, dipungut atau disetor.

Pemerintah harus memahami keterikatannya dengan masyarakat lebih khusus pemerintah desa karena desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam suatu Riwayat Rasulullah SAW bersabda:

“Imam itu ialah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang di gembalakannya)” (HR. Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a)

Jadi pemerintah daerah harus memfokuskan kinerja disetiap desa dalam rangka pengembangan masyarakat agar bersinergi baik Pemerintah Daerah, desa, dan masyarakat. Sehingga pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain [pendapatan asli desa
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
- f. Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

Tujuan dari peraturan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi terutama terhadap daerah yang tertinggal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dari desa.

Dari anggaran desa masyarakat memiliki harapan besar untuk menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dengan birokrasi yang sudah direncanakan dan harus direalisasikan sesuai dengan fungsinya yaitu desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12).

Laporan anggaran Dana Desa dari setiap bidang yang sudah ditentukan melalui desa yaitu:

Jumlah biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 253.494.408
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 894.146.509

Berjalannya birokrasi desa tidak lepas dari masyarakat yang bergerak, optimis dan mau bekerjasama dengan penyediaan transparansi yang dibuka oleh Kepala Desa yaitu Ibu Yuliasnita selaku wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.

4.2 Saran

Setiap pemerintah yang bertugas pasti memiliki peran dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera kepada masyarakatnya maka formulasi kebijaksanaan berjalan dengan baik apabila Visi dan Misi direalisasikan berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan termasuk di desa Buo.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia, dan kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam mendapat informasi dalam kepengurusan surat menyurat dalam desa.

Adapun yang menjadi saran bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa harus lebih meningkatkan tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin Desa Buo agar Desa Buo dapat menjadi desa yang diteladani dan menjadi desa tempat masyarakat yang sejahtera serta kepala desa harus dapat mengayomi masyarakat desa menjadi masyarakat yang demokratis. Dan tugas seorang pemimpin adalah sebagai penggerak untuk menopang seluruh masyarakat untuk bekerja dan ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan alokasi dana desa.
2. Masyarakat Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum, toleransi, adil, serta mampu memberikan partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pemberian saran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum di desa

3. Dan untuk Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) harus lebih efektif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa yang sedang berlangsung dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya supaya tidak terjadi tindak penggelapan pajak dana desa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Surah Al-Zalzalah 7-8

Bohari. 2016. *Pengantar Hukum pajak*. Jakarta : Rajawali Pers

Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat

Buku Panduan Pajak Bendahara Desa Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

Fitriandi P, Yuda A, dan Agus P.P. 2015. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Selemba Empat.

Gusfahmi. 2017. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta. PT Raja Grahaindo, Jakarta.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari Buo Tahun Anggaran 2020 Kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN)

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi

Peraturan Buoati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2020

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat

Sukardji, Untung. 2017. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Depok : Rajawali Pers

Santoso, Brotodihardjo, Wahyuni.N. 2018. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.(KUP)*. Edisi 1. Pekanbaru: Wahyuni.N.

Wahyuni.N. 2018. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.(KUP)*. Edisi 1. Pekanbaru: Wahyuni.N.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

<https://klc.kemenkeu.go.id/puspsdm-pajak-dana-desa/> diakses pada 31 Mei 2021 pukul 01.45 Wib

<https://www.ulasanpajak.com/2019/09/pajak-pajak-dana-kelurahan-dan-dana-desa.html> diakses pada 31 Mei 2020 pukul 01.55 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2996209/begini-ketentuan-pajak-penggunaan-dana-desa-dari-apbn> diakses pada 29 Mei 2021 pukul 00.25 Wib

http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/113620 diakses pada 10 Juni 2021 pukul 14.00 Wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA KANTOR WALI NAGARI BUO KECAMATAN LINTAU BUO

1. Berapa anggaran yang dikeluarkan pemerintah nagari Buo pada saat realisasi dalam bidang penyelenggaraan nagari?
2. Bagaimana cara mengantisipasi adanya penggelapan pajak dana desa di Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo?
3. Apakah pelaporan pajak di Kantor Wali Nagari Buo Sudah Efektif?
4. Bagaimana cara menghitung pajak dana desa?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/1849/2021
Sifat Biasa
Lampiran -
Hal Izin Penelitian

Pekanbaru, 17 Maret 2021 M
3 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

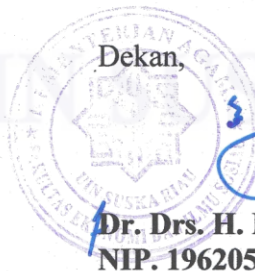
Nama : Sherly Qhuratta Ayuni
NIM. : 01870624289
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Efektivitas Pelaporan Data Dalam Mencegah Penggelapan Pajak Dana Desa Pada Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MA
NIP. 19620512 198903 1 003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

JIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1856/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 17 Maret 2021 M
3 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Sahwitri Triandani, S.E., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

N a m a	: Sherly Qhuratta Ayuni
NIM	: 01870624289
Jurusan	: D-III Perpajakan
Semester	: VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Efektivitas Pelaporan Data Dalam Mencegah Penggelapan Pajak Dana Desa Pada Kantor Wali Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

WALI NAGARI BUO

KECAMATAN LINTAU BUO

Alamat : Jalan Raya Setangkai Tlp “ (0752) 777530 “ Kode Pos = 27292 =

Nomor : 411.3/121 /Pemn/B-2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Buo, 22 Maret 2021
Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN Suska Riau

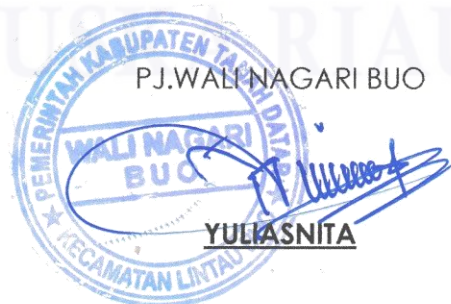
Di
Tempat

Menindaklanjuti Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintau Provinsi Nomor 503/DPMT/NON IZIN-RISET/39840 tanggal 19 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk bahan KTI.

Sehubungan dengan hal tersebut kami Pemerintah Nagari Buo memberikan Izin kepada :

1. Nama : SHYERLY QHURATTA AYUNI
2. Nim/KTP : 01870624289
3. Program Studi : PERPAJAKAN
4. Jenjang : D III
5. Alamat : Pekanbaru
6. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PELAPORAN DATA DALAM MENCEGAH PENGGELAPAN PAJAK DANA DESA PADA KANTOR WALI NAGARI BUO KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR

Demikian Izin ini diberikan dengan Catatan tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.



Tembusan Yth

1. Camat Lintau Buo di Buo
2. BPRN Buo
3. KAN Buo

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Sherly Quratta Ayuni lahir di Buo, 29 September 1999. Ayahanda bernama Zulkifli dan Ibunda bernama Efriati. Penulis anak ke empat dari enam bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di TK Pertiwi Buo 2005. Kemudian dilanjutkan pada Pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 09 Buo dari kelas 1-6 dan selesai pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingkat pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lintau Buo yang berakhir pada tahun 2014. Dilanjutkan pada pendidikan tingkat atas yaitu pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Lintau Buo dan tamat pada tahun 2018. Tepatnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) dengan Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dibawah Bimbingan Ibu Sahwitri Triandani, SE, M,Si dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAPORAN DATA DALAM MENCEGAH PENGELAPAN PAJAK DANA DESA PADA KANTOR WALI NAGARI BUO KECAMATAN LINTAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR”**